

Dr. Muslim Mufti, M.Si.
Drs. H. Ahmad Syamsir, M.Si.

PEMBANGUNAN POLITIK



Pengantar
Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, M.A.

Dr. Muslim Mufti, M.Si.
Drs. H. Ahmad Syamsir, M.Si.

PEMBANGUNAN POLITIK

Pengantar
Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, M.A.



Penerbit PUSTAKA SETIA Bandung

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PEMBANGUNAN POLITIK

ISBN 978-979-076-615-0

Cet. I: Desember 2016, 16 x 24 cm, xx + 414 hlm.

Penulis: Dr. Muslim Mufti, M.Si.

Drs. H. Ahmad Syamsir, M.Si.

Pengantar: Prof. Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, M.A.

Editor: Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.

Desain Sampul: Tim Desain Pustaka Setia

Setting, Montase, Layout: Tim Redaksi Pustaka Setia

Cetakan ke-1: Desember 2016

Diterbitkan oleh:

CV PUSTAKA SETIA

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164

Telp. (022) 5210588, Faks. (022) 5224105

E-mail: pustaka_seti@yahoo.com

Web: www.pustakasetia.com

Bandung 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)

Copyright © 2016 CV PUSTAKA SETIA

Dilarang mengutip memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved.

KATA PENGANTAR

Penulis mengawali uraiannya dengan menjelaskan bahwa aliran pemikiran dalam studi pembangunan dipengaruhi oleh dua tradisi pemikiran ilmu sosial kontemporer, yaitu Marxian dan Weberian. Tradisi pemikiran Marxian bersumber dari pemikiran Karl Marx. Dasar filsafat pemikiran Marx berakar dari tradisi Jerman dengan filsafat idealisme dan analisis historisnya. Dalam hal ini konsep George Hegel mengenai *the cyclical historical* memengaruhi Marx dalam elaborasi teori evolusi masyarakatnya.

Prioritas utama studi Marx adalah mengenai mode produksi (*mode of production*), yaitu proses cara masyarakat memenuhi kebutuhan materialnya. Menurutnya, mode produksi merupakan hubungan totalitas antara produksi dan kekuatan-kekuatan produksi dari anggota masyarakat sehingga konsekuensi dari mode produksi ini melahirkan *division of labour*. Pembagian kerja ini menimbulkan ketidakmerataan ataupun ketidaksejajaran, yang pada sisi lemah menyebabkan kemiskinan dan terjadinya determinasi kelas sosial menjadi *rulers* dan *masses*. Bertolak dari hal ini, Marx mengembangkan filsafat pemikirannya, seperti *historical materialism*, alienasi, dialektika, mode produksi, kekuatan produksi, hubungan produksi, pembagian kerja, struktur kelas, dan perjuangan kelas.

Pembangunan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional Indonesia. Hal ini disebabkan keberhasilan dalam pembangunan politik menciptakan iklim yang kondusif bagi keberhasilan

pembangunan nasional secara keseluruhan. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang lainnya (ekonomi, sosial, dan budaya) juga akan memperlancar pembangunan politik. Kegagalan dalam pembangunan politik tentu akan mengganggu pembangunan nasional secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan politik merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan politik tersebut membentuk berbagai wahana yang mutlak diperlukan untuk menggerakkan roda pembangunan nasional.

Tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan politik adalah terbentuknya sistem politik yang demokratis dan rakyat menikmati kebebasan, termasuk kebebasan untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah. Dengan kata lain, tujuan utama pembangunan politik adalah terbentuknya sistem politik yang demokratis. Oleh karena itu, pembangunan politik juga dapat dianggap sebagai demokratisasi kehidupan politik.

Dengan uraian tersebut para pembaca sudah dapat memahami substansi materi dalam buku ini, yang terminologi politik dengan pendekatan historis yang mendalam, juga mengupas jelas politik dalam makna filosofis yang dikembangkan oleh para pemikir sekaligus pelaku politik, baik di Indonesia maupun di negara lain yang lebih bombastis dan lebih terbuka menyuarakan demokrasi. Penulis juga membahas keterlibatan militer dalam bisnis dan politik yang menggambarkan mulai hilangnya netralitas militer di tengah perpolitikan di bumi Nusantara ini.

Saya cukup mengapresiasi kehadiran buku ini karena akan memberikan pengembangan wawasan pengetahuan untuk seluruh pembaca, terutama mahasiswa yang sedang mengembangkan ilmu sosial dan ilmu politik.

Prof. Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, M.A.

Guru Besar Komunikasi Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

PENGANTAR PENULIS

Studi mengenai pembangunan politik telah berkembang pesat sejak dasawarsa 60-an. Hal ini dipelopori oleh sejumlah ilmuwan muda Amerika Serikat yang melakukan penelitian di banyak negara, untuk keperluan disertasi doktrinya, di antaranya David Apter, Leonard Binder, Lucian W. Pye, James Coleman, Henry Biennen, Dankwart Rustow, dan Myron Weiner.

Tema utama pembangunan politik pada dekade 50-an adalah modernisasi. Pada dekade 60-an dilanjutkan dengan studi pembangunan dan developmentalisme, kemudian dekade 70-an berkembang studi depedensi. Setelah itu, dekade 80-an studi politik bergeser ke fokus mengenai *state* (negara) dan tahun 90-an merupakan dekade demokratisasi re-demokratisasi.

Buku ini merupakan pegangan penting untuk mata kuliah Pembangunan Politik, yang dikaji secara mendalam di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta di Jurusan Politik Islam (Siyasah). Semoga buku ini mempermudah pengayaan wawasan pengetahuan tentang teori dan peristiwa perpolitikan di Indonesia, umumnya di berbagai negara.

Dr. Muslim Mufti, M.Si.
Drs. H. Ahmad Syamsir, M.Si.

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN	1
A. Konsep Pembangunan Politik	1
B. Teori Tahap dan Modernisasi	13

BAB 2

PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH	15
A. Bentuk Partisipasi Politik	21
B. Perubahan Perilaku Politik Terhadap Partisipasi Politik	23
C. Dimensi Subjektif Individu	28
D. Partai Politik	29
E. Daftar Partai Politik di Indonesia	34

BAB 3

MODEL DEMOKRASI WESTMINSTER DAN MODEL DEMOKRASI KONSENSUS	53
A. Pendahuluan	53
B. Model Demokrasi Konsensus	57
C. Hubungan antara Demokrasi Langsung Prinsip Mayoritarian dan Konsensus	60
D. Demokrasi di Indonesia	62

E. Analisis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Model Demokrasi Arendt Lijphart.....	63
F. Undang-undang Partai Politik Cermin Demokrasi di Indonesia	68
BAB 4	
BIROKRASI DAN POLITIK	153
A. Konsep Birokrasi	155
B. Tipe dan Bentuk Birokrasi	157
C. Reformasi Birokrasi Indonesia.....	162
BAB 5	
PLURALISME DAN ELITISME	169
A. Perpecahan Suku dan Negara-negara Bagian Nasional	169
B. Konseptor Elite Politik	178
BAB 6	
MILITER DAN POLITIK	183
A. Konsolidasi Demokrasi	185
B. Militer Profesional	191
C. Perubahan Karakteristik Militer	198
D. Kontrol Sipil atas Militer	205
E. Supremasi Sipil.....	210
F. Demokratisasi	212
G. Undan-undang Pemerintahan Daerah dan Pilkada di Indonesia	217
DAFTAR PUSTAKA	427
PROFIL PENULIS	438

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Konsep Pembangunan Politik

Ronald H. Chilcotte mengemukakan bahwa teori-teori pembangunan politik memiliki beberapa tipe, yaitu sebagai berikut:

1. berasosiasi dengan gagasan demokrasi;
2. fokus pada aspek-aspek pembangunan dan perubahan politik;
3. menguji krisis dan konsekuensi pembangunan politik.

Pembangunan politik diimbangi dengan pemerintahan yang kuat dan kewenangan yang teratur. Pertanyaan berkisar pada derajat kebebasan pers, sistem partai, kebiasaan pemberian suara, dan standar hidup. Kondisi demokrasi menyertakan sistem kelas terbuka, kesejahteraan ekonomi, ekonomi kapitalis, semakin tinggi tingkat industrialisasi, pendidikan, kesejahteraan, semakin besar pula prospek demokrasi.

Pada saat pemerintahan berkembang melalui peningkatan pembedaan, krisis kesetaraan, dan kapasitas maka dapat menimbulkan situasi krisis identitas, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi. Krisis identitas berkaitan dengan budaya massa dan elite dalam pengertian perasaan nasional mengenai wilayah, pembelahan mengenai wilayah yang menggerogoti kesatuan nasional, dan konflik antarloyalitas etnik dengan komitmen nasional. Krisis legitimasi tumbuh karena perbedaan mengenai kewenangan. Krisis partisipasi merupakan konflik yang terjadi ketika elite

yang memerintah memandang pemerintah serta perilaku individu dan kelompok yang mencoba berpartisipasi dalam sistem politik sebagai tidak berlegitimasi. Krisis penetrasi dicirikan oleh tekanan pada elite yang memerintah untuk membuat adaptasi atau inovasi institusional dengan keragaman tertentu. Krisis distribusi dianalisis dalam pengertian masalah-masalah, seperti ideologi, sumber daya fisik dan manusia, serta lingkungan institusional.

Pemberdayaan politik dapat dilacak dari konsep pembangunan politik yang mulai dikembangkan sejak akhir dekade 1950-an. Sedikitnya ada dua peristiwa besar yang mendorong munculnya studi pembangunan politik, yaitu sebagai berikut.

1. Lahirnya negara-negara baru Dunia Ketiga pasca-Perang Dunia II, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Hal ini menjadi tantangan baru bagi ilmuwan untuk melakukan kajian politik di wilayah tersebut, misalnya mengkaji tentang perubahan politik atau penerapan sistem politik beserta infrastruktur yang menopangnya.
2. Berkembangnya studi area dan revolusi behavioralisme dalam ilmu politik. Hal ini ditandai dengan upaya yang sungguh-sungguh para ilmuwan politik untuk mengombinasikan kecermatan teoretis dan metodologi untuk melakukan penelitian empirik lintas-nasional, yang dapat menghasilkan generalisasi universal dan komparatif.

Pembangunan politik merupakan aspek-aspek modernisasi. Hal tersebut menjadi sebuah gagasan ataupun proses yang luas dan kompleks sehingga muncul keyakinan awal bahwa pembangunan politik harus dimaknai dan diukur dengan banyak kriteria.¹

Tiga dasar dan jantung pembangunan politik menurut Pye, yaitu sebagai berikut.

1. Lucian Pye, *Aspects of Political Development*, Boston: Little Brown, 1966, Bab II. Tiga tahun sebelumnya, Pye telah memimpin proyek besar, yang kemudian menghasilkan sebuah buku suntingan *Communications and Political Development*, Princeton: Princeton University Press, 1963. Buku ini memuat diskusi teoretis tentang hubungan antara komunikasi dan pembangunan politik serta studi kasus pola komunikasi di Jepang, Turki, Iran, Thailand, dan Cina. Di antara tema-tema yang dikembangkan dalam buku tersebut adalah peranan media massa dalam mentransformasikan sikap, pola komunikasi di wilayah Dunia Ketiga, dan peranan kaum intelektual dalam proses modernisasi.

1. Peningkatan persamaan (*equality*), yang berkaitan dengan masalah partisipasi, demokratisasi, mobilisasi, keadilan hukum, dan rekrutmen didasarkan pada hasil yang dicapai.
2. Kapasitas (*capacity*), yang berkaitan dengan prestasi aparat birokrasi, efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan publik, serta reformasi dan rasionalisasi administrasi.
3. Diferensiasi dan spesialisasi, yang berkaitan dengan desentralisasi, spesialisasi fungsi, dan integrasi elite.²

Kriteria pembangunan politik menurut Almond dan Powell, yaitu:

1. diferensiasi struktural;
2. otonomi subsistem;
3. sekularisasi budaya.³

Adapun menurut Claude Welch, pada umumnya modernisasi politik memiliki ciri khas berikut.

1. Peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara yang disertai dengan melemahnya sumber-sumber wewenang kekuasaan tradisional.
2. Diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lembaga politik.
3. Peningkatan partisipasi rakyat dalam politik dan kesediaan individu-individu untuk mengidentifikasi dirinya dengan sistem politik sebagai suatu keseluruhan.⁴

Pembangunan politik menunjuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik, yang mengarah pada etos keadilan dengan bertujuan akhir pada penguatan kapasitas sistem politik. *Pertama*, diferensiasi politik dapat dikatakan sebagai salah satu kecenderungan dominan sejarah perkembangan sistem politik modern. *Kedua*, prinsip kesamaan dan keadilan merupakan etos masyarakat modern. Modernisasi politik diartikan sebagai usaha untuk merealisasikan prinsip keadilan

2. *Ibid.*, hlm. 47.

3. Gabriel Almond dan Bingham Powell, *Comparative Politics: Developmental Approach*, Boston: Little Brown, 1966.

4. Claude E. Welch, "Studi Perbandingan Modernisasi Politik", dalam Yahya Muhaimin dan Colin MacAndrews (eds.), *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, Yogyakarta: UGM Press, 1998, hlm. 34.

2. Pandangan dualisme masyarakat yang satu modern, kapitalis dan maju, sedangkan yang lain terisolasi, feodal atau prakapitalis dan terbelakangan adalah keliru karena keterbelakang wilayah-wilayah miskin merupakan produk-produk historis perkembangan wilayah progresif.
3. Hubungan metropole satelit dikemukakan pada tingkat internasional ataupun dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial di koloni dan negara neo-kolonial.

BAB 2 PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH

Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada saat pemilihan umum dalam ilmu politik terangkum sebagai bagian dari kajian perilaku politik. Menurut Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik merupakan sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (*action*) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.¹ Senada dengan pendapat Huntington dan Nelson, Rasinski dan Tyler² mengungkapkan bahwa inti partisipasi politik adalah tindakan masyarakat yang dapat memengaruhi keputusan politik. Adapun menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik yang mencakup semua kegiatan sukarela, yang menuntut seseorang untuk ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin politik dan ikut langsung ataupun tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.³ Asumsinya bahwa orang yang paling mengetahui tentang keinginan masyarakat adalah masyarakat atau individu tersebut. Oleh karena itu, partisipasi politik individu dalam masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan

1. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm 5; bandingkan dengan Miriam Budiardjo, "Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar" dalam Miriam Budiardjo (Penyunting), *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: YOI, 1982, hlm. 2.
2. Kenneth A. Rasinski dan Tom R. Tyler, *Political Behavior Annual*, Vol. 1, Colorado: Westview Press, 1986, hlm. 110.
3. Miriam Budiardjo, *ibid.*, hlm. 3.

pemerintah yang menyangkut harkat kehidupan mereka sendiri. Menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau budaya politik demokrasi adalah kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk itu, setiap warga negara harus meyakini kompetensinya untuk terlibat dalam proses politik. Pada sisi lain, pemerintah memerhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan bersikap apatis terhadap pemerintah.

Pertanyaan yang muncul ketika partisipasi politik ditawarkan oleh pemerintah adalah, apakah individu harus mendukung secara mutlak program-program yang dirancang oleh pemerintah atau individu tersebut yang berperan dalam pembuatan program/kebijakan? Dalam hal ini masyarakat diposisikan sebagai mitra pemerintah.

Untuk memahami partisipasi politik, Huntington dan Nelson menjelaskan spektrum partisipasi politik tersebut. Menurut mereka, ada dua jenis partisipasi politik yang bergerak pada satu garis spektrum. *Pertama*, partisipasi otonom (*otonomous*). Partisipasi otonom adalah jenis partisipasi yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Partisipasi ini dalam hal memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang sesuatu kepada pemerintah, mendirikan partai politik, menjadi kelompok penekan bagi pemerintah, memberikan haknya pada pemilihan umum, dan sebagainya, yang diinginkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. *Kedua*, partisipasi mobilisasi.⁴ Partisipasi yang dimobilisasi lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain (*state* ataupun *private*) menjadi sangat signifikan terhadap partisipasi individu atau kelompok. Dalam bahasa Loekman Soetrisno disebutkan bahwa kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.⁵

Definisi partisipasi politik yang hampir senada disampaikan oleh Silvia Bolgherini. Menurut Bolgherini, partisipasi politik adalah "... a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a

4. Huntington dan Nelson, *Op.Cit.*, hlm. 9-14.

5. Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipasi*, Jakarta: Kanisius, 1992, hlm. 207.

*more or less direct way-legal, conventional, pacific, or contentious.*⁶ Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

Studi klasik mengenai partisipasi politik dilakukan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Melalui penelitian mereka, Huntington dan Nelson menyatakan bahwa partisipasi yang bersifat *mobilized* (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bolgherini, yaitu bahwa dalam melakukan partisipasi politik, salah satu cara yang digunakan bersifat paksaan (*contentious*). Bagi Huntington dan Nelson, perbedaan partisipasi politik sukarela dan mobilisasi (diarahkan senada dengan dipaksa) hanya dalam aspek prinsip bukan kenyataan tindakan. Intinya, baik sukarela maupun dipaksa, warga negara tetap melakukan partisipasi politik.

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh memunculkan perbedaan dalam pola partisipasi politik warga negaranya. Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal berbeda dengan di negara dengan sistem Komunis atau Otoritarian. Bahkan, di negara-negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal juga terdapat perbedaan, seperti yang ditunjukkan Oscar Garcia Luengo dalam penelitiannya mengenai *E-Activism: New Media and Political Participation in Europe*.⁷ Warga negara di negara-negara Eropa Utara (Swedia, Swiss, dan Denmark) cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi politiknya daripada negara-negara Eropa bagian selatan (Spanyol, Italia, Portugal, dan Yunani).

Karena partisipasi politik memiliki sifat spektrum, justifikasi bahwa ada dua kubu yang saling bertentangan merupakan hal yang tidak benar. Pengertian yang tepat dalam konteks tersebut adalah pada suatu waktu

6. Silvia Bolgherini, "Participation" dalam Mauro Calise dan Theodore J. Lowi, *Hyperpolitics: an Interactive Dictionary of Political Science Concept*, Chicago: The University of Chicago, 2010, hlm. 169.

7. Oscar Garcia Luengo, *E-Activism New Media and Political Participation in Europe*, (CONFINES 2/4 Agosto-Diciembre 2006).

- Kepala Divisi Administrasi pada Kanwil Depkumham Aceh, Syamsul Bahri.
- c. Partai Damai Aceh (PDA) ikut dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh. Partai ini merupakan satu dari tiga partai lokal di Aceh yang lolos untuk mengikuti pemilu legislatif 2014. Sebelumnya Partai Damai Aceh menyerahkan berkas pendaftaran sebagai peserta pemilu 2012 ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Selasa 4 September 2012. Partai Damai Aceh bukan partai lokal baru. Partai ini merupakan cikal bakal dari Partai Daulat Aceh. Karena Partai Daulat Aceh tidak mencapai perolehan suara batas minimal untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya, Partai Daulat Aceh diganti nama menjadi Partai Damai Aceh.

BAB 3

MODEL DEMOKRASI WESTMINSTER DAN MODEL DEMOKRASI KONSENSUS

A. Pendahuluan

Menurut Arendt Lijphart¹ model demokrasi terdiri atas dua macam, yaitu model demokrasi Westminster dan model demokrasi konsensus.

Dasar model Westminster adalah *majority rule*. Model ini dapat dilihat sebagai solusi yang paling nyata mengenai dilema tentang maksud "rakyat (*the people*)" dalam definisi demokrasi. Siapa yang akan memerintah dan pada kepentingan siapa pemerintah merespons ketika rakyat tidak setuju dan mempunyai pilihan berbeda? Jawabannya adalah *the majority of the people*. Manfaat besar dari jawaban lain, seperti syarat kebulatan suara hanya salah satu jawaban, memerlukan *minority rule*—atau sekurang-kurangnya hak suara minoritas (*minority veto*)—dan pemerintahan oleh mayoritas dan sesuai dengan keinginan mayoritas lebih dekat pada demokrasi yang ideal, lalu pemerintahan lebih dekat dan mau mendengarkan minoritas. Alternatif jawaban untuk dilema ini adalah sebanyak orang dimungkinkan.

Arendt Lijphart berpendapat bahwa demokrasi dengan prinsip mayoritarian lebih tepat diterapkan pada masyarakat yang bersifat homogen, sedangkan demokrasi dengan prinsip konsensus lebih tepat diterapkan pada masyarakat yang heterogen. Pendapat ini diterapkan pada

1. Arendt Lijphart, *Democracies Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Century*, New Haven dan London: Yale University Press, 1924.

analisis beberapa contoh demokrasi yang benar-benar diterapkan dan telah berlangsung di beberapa negara Barat, yaitu Inggris, Selandia Baru, Swiss, Belgia, dan Amerika Serikat.

Prinsip mayoritarian yang murni disebutnya sebagai model Westminster, mengambil nama dari lokasi gedung parlemen Inggris yang terletak di bagian Kota London, yang disebut sebagai *City of Westminster*. Prinsip ini berdasarkan pada pandangan bahwa dalam kehidupan politik, mayoritaslah yang harus memerintah berdasarkan kehendak masyarakat banyak. Dalam arti, kehendak tersebut harus mencerminkan kehendak sebanyak mungkin warga masyarakat. Model ini memiliki beberapa ciri penting berikut.

1. Konsentrasi kekuasaan eksekutif. Kekuasaan satu partai dengan kabinet yang berasal dari partai mayoritas. Prinsip ini mengatur bahwa kabinet memiliki kekuasaan yang kuat, pada umumnya dibentuk oleh partai dengan kursi parlemen mayoritas sehingga kabinet koalisi hampir tidak pernah terjadi.
2. Fusi kekuasaan dan dominasi kabinet. Sistem pemerintahan di Inggris secara formal adalah parlementarian, yang berarti kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jika tidak puas dengan kinerja kabinet, parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya yang dapat berakibat pada keruntuhan kabinet. Akan tetapi, pada kenyataannya karena kabinet pada umumnya disusun oleh partai dengan mayoritas kursi parlemen, keruntuhan kabinet karena mosi parlemen hampir tidak pernah terjadi sehingga pada praktiknya kabinet sangat kuat.
3. Bikameralisme asimetris. Parlemen Inggris terdiri atas dua kamar, yaitu *House of Commons* dan *House of Lords*. Akan tetapi, kekuasaan yang sebenarnya terletak di tangan *House of Commons* (Majelis Rendah), yang terdiri atas wakil-wakil rakyat, sementara *House of Lords* (Majelis Tinggi) hanya memiliki satu kewenangan, yaitu menunda legislasi tentang keuangan sampai satu bulan, selebihnya dia tidak memiliki kewenangan apa pun.
4. Sistem dua partai. Kehidupan politik Inggris didominasi dua partai, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif. Selain itu, terdapat pula partai lain, seperti Partai Liberal, tetapi kekuatannya tidak signifikan. Kursi kabinet didominasi dua partai tersebut.

5. Sistem partai berdimensi tunggal/satu. Masing-masing partai di Inggris mewakili satu jenis kepentingan ekonomi, Partai Buruh mewakili kepentingan ekonomi kiri sampai tengah, sementara kepentingan ekonomi kanan ke tengah diwakili Partai Konservatif. Sistem ini juga tercermin dalam pola dukungan pemilih, yang kelas atas dan menengah cenderung mendukung Partai Konservatif, sementara kelas pekerja memberikan suara kepada calon-calon dari Partai Buruh. Terdapat juga perbedaan lain dalam masyarakat, misalnya faktor agama, tetapi hal ini tidak terlalu terlihat dalam pola dukungan masyarakat kepada calon dari partai tertentu. Pemilih di Inggris sangat homogeni, dan isu ekonomi merupakan satu-satunya isu yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola pilihan masyarakat.
6. Sistem pemilihan pluralitas. Semua anggota Majelis Rendah dipilih dengan sistem pluralitas, yang berarti setiap calon harus memperoleh suara mayoritas di distrik berwakil tunggal.
7. Pemerintah unitarian terpusat. Pemerintah daerah melaksanakan beberapa fungsi, tetapi kekuasaan tersebut tidak dijamin secara kuat dalam konstitusi. Pemerintah daerah juga bergantung secara finansial kepada pemerintah pusat.
8. Konstitusi tidak tertulis dan kedaulatan parlemen. Inggris memiliki konstitusi yang tidak tertulis, dalam arti bahwa Inggris tidak memiliki satu dokumen yang disebut konstitusi, yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak rakyat. Meskipun demikian, di Inggris terdapat sejumlah aturan dasar, kebiasaan, dan konvensi. Walaupun tidak terdapat konstitusi tertulis, pada umumnya konstitusi tidak tertulis dipatuhi oleh parlemen dan pemerintah. Parlemen memiliki hak untuk mengubah aturan jika ia berkehendak.
9. Demokrasi perwakilan seutuhnya. Karena kedaulatan parlemen kekuasaan sepenuhnya berada di tangan parlemen, ide tentang demokrasi langsung tidak memiliki ruang untuk dilaksanakan di Inggris. Oleh karena itu, referendum sebagai bentuk demokrasi langsung sama sekali tidak memiliki dasar.

Meskipun kesembilan ciri model demokrasi Westminster adalah mayoritarian, tetapi tidak terjadi ancaman tirani mayoritas dalam pelaksanaan demokrasi di Inggris. Pelaksanaan demokrasi sudah cukup

BAB 4 BIROKRASI DAN POLITIK

Dalam membangun suatu pemerintahan, suatu birokrasi senantiasa mengarah pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip yang penting adalah kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa atau birokrat sehingga akan melahirkan sistem kontrol yang memadai dari rakyat. Dengan demikian, pejabat birokrasi bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menggambarkan kewajiban birokrasi dan menyampaikan akuntabilitasnya kepada rakyat. Akan tetapi, birokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh kultur dan etika birokrasi¹ dan tidak dapat mengadopsi rasionalitas birokrasi dari Weber. Hal ini terbukti dari tidak berlaku sepenuhnya semua aturan dan tata prosedur yang tegas dan impersonal dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Korupsi di birokrasi terjadi melalui penyimpangan arah dan kinerja sehingga birokrasi tidak berfungsi sebagaimana idealnya selaku pengabdian cita-cita dan tujuan bangsa serta negara. Secara empiris, bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi berupa penyalahgunaan keuangan negara, manipulasi anggaran, dan sebagainya. Pejabat birokrasi memandang dan memahami sumber daya yang ada

1. Kultur birokrasi adalah karakter kolektif masyarakat dalam menghayati dan memperlakukan birokrasi, sedangkan etika birokrasi adalah karakter individu atau kelompok dalam hal ini aparatur birokrasi, baik secara individu maupun kolektif dalam memahami dan memberlakukan kewenangan dan tugasnya sebagai aparatur birokrasi, lihat M. Mas'ud Said, *Birokrasi di Negara Birokratis: Makna Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*, UMM Press, 2007, hlm. 189.

adalah miliknya sehingga berhak memperlakukan semaunya, sesuka selera. Pengaruh terbesar dari kondisi ini adalah karena kultur feodalisme, yaitu birokrasi dibentuk oleh raja yang patrimonial sehingga layanan ditujukan kepada raja (abdi dalem) bukan kepada rakyat. Kemudian, pada masa kolonial birokrasi kerajaan tradisional tetap dipertahankan untuk memanfaatkan elite-elite pribumi dalam rangka memperkuat kekuasaan kolonial di Indonesia. Masa kemerdekaan juga masih dipengaruhi oleh birokrasi patrimonial. Pengaruh feodalisme dan kolonialisme juga masih berlanjut dalam bentuk membangun hubungan patron-klien yang kental dan berorientasi ke atas yang sangat kuat (bapakisme). Pada masa Orde Baru ada upaya memodernkan birokrasi, akan tetapi ciri budaya patrimonialnya masih kental, hubungan bapak dan anak memengaruhi hampir semua segi penting dalam kehidupan politik Indonesia, bahkan birokrasi menjadi andalan dalam politik Orde Baru, yaitu sebagai alat politik untuk memenangkan Golkar dalam pemilu, yakni Korpri. Birokrasi yang dijadikan instrumen kekuasaan oleh politisi, berperan sebagai agen perubahan² ternyata hanya untuk kepentingan pragmatisme atau jangka pendek. Padahal, birokrasi dapat menjadi bagian penting dalam proses integrasi satu bangsa.³ Politisasi birokrasi menimbulkan masalah terhadap masyarakat yang menyangkut aspek pelayanan dan ketidakstabilan karier dalam birokrasi. Dalam konsep pembangunan politik birokrasi adalah faktor penting, terutama apabila konsep birokrasi⁴ digunakan oleh negara pasca-kemerdekaan, seperti Indonesia.

Reformasi birokrasi sejak pasca-kemerdekaan hingga sekarang senantiasa dilakukan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan politisasi birokrasi mewarnai dalam dinamikanya sehingga tujuan mencapai *good*

2. Tentang agen perubahan dapat dilihat dari beberapa rumusan tentang pembangunan politik, terutama Howard Wriggins dalam integrasi bangsa yang menempatkan lembaga administratif, seperti birokrasi yang meluaskan jaringan praktik dan prosedur yang seragam pada seluruh negara, lihat Yahya Muhaimin dan Collin Mac Andrews, *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hlm. 57.
3. Peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar, *Ibid.*, hlm. 51.
4. Aspek netralitas dan fungsi birokrasi dalam pemikiran Weber dikenal dengan konsep konservatif. Weber hanya ingin meletakkan birokrasi sebagai sebuah mesin daripada dilihat sebagai organisme yang mempunyai kontribusi terhadap kebulatan organik dari sebuah negara, lihat Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 21.

governance masih harus diusahakan dengan kerja keras. Oleh karena itu, bab ini akan membahas masalah batasan politik dalam kaitan relasi antara birokrasi dan politik agar dapat dicegah politisasi birokrasi.

A. Konsep Birokrasi

Konsep birokrasi bermula dari pengamatan tajam yang dilakukan oleh De Goumay, yang memiliki dua alasan penting bagi rumusan birokrasi.⁵ *Pertama*, dengan eksplisit membahas klasifikasi pemerintahan klasik Yunani klasik. De Goumay menemukan tiga tipe pemerintahan lain yang kemudian menambah banyak bentuk pemerintahan yang telah dikenal, seperti monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Oleh karena itu, ia tidak memandang pemerintahan Prancis pada abad ke-18 sebagai bentuk cacat dari monarki, seperti tirani. Ia mengidentifikasi adanya kelompok pengusaha dan suatu metode pemerintah baru. Keluhannya kepada kelompok penguasa baru ini bukan disebabkan oleh tindakan mereka yang melebihi wewenang yang semestinya, melainkan karena bahwa memerintah menjadi tujuan tersebut. Tipologi klasik ini, sekalipun hanya dengan identifikasi yang sepintas lalu, sudah semestinya dipandang sebagai inovasi konseptual yang sangat penting. *Kedua*, istilah *bureau* yang telah diakui umum, yang juga berarti meja tulis, selalu diartikan sebagai tempat para pejabat bekerja. Tambahan sisipan *cracy* yang diturunkan dari kata Yunani (*kratein*), yang berarti mengatur (*to rule*) menghasilkan istilah yang memiliki kekuatan sangat dahsyat, menembus budaya-budaya lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika definisi birokrasi secara konsisten telah tercantum dalam kamus-kamus yang paling awal, baik yang berkaitan dengan pendapat De Goumay maupun pendapat lainnya.

Kamus Akademi Prancis tahun 1798 memasukkan kata tersebut dalam suplemen dan mengartikannya sebagai "kekuasaan", pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintahan. *Kamus Akademi Prancis* juga menerima penggunaan kata "birtokratik", yang maknanya mengacu pada biro (*bureaux*), yakni pengaruh biro pemerintahan, dan suatu rezim yang di dalamnya biro menjadi berlipat ganda. Pengertian berlipat ganda ini

5. Martin Albrow, *Birokrasi*. Yogyakarta: Wacana, Cetakan Ketiga, 2005, hlm. 3-4.

Baru dari sudut pandang ekonomi kapitalis. Bagi Robison, dalam negara model ini, elite militer dan elite birokrat telah mengatasnamakan kepentingan umum untuk mengejar kepentingan individual mereka bersama kelompok patronalnya. Mereka membangun jaringan kerja yang efektif untuk menjamin keamanan dan distribusi keuntungan. Negara membatasi dan menekan potensi konflik dalam upaya memelihara tertib politik sehingga menjamin, baik pengembangan ekonomi kapitalis maupun para kapitalis, yang sesungguhnya adalah para elite militer dan birokrat beserta kelompoknya. Dengan demikian, *polity* menjadi sesuatu yang "transidental" bagi masyarakat.

BAB 5 PLURALISME DAN ELITISME

A. Perpecahan Suku dan Negara-negara Bagian Nasional

1. Etnisitas dan Konflik Etnis

Sejak tahun 1860 hingga 1960-an, para ahli dan teorisi liberal dan politik sosialis, dalam signifikansi politis terhadap perpecahan etnis, religius, dan kultural dalam masyarakat sebuah negara, meninggalkan perbedaan kelas dan ekonomi sebagai isu yang paling penting dalam perdebatan politik. Hal ini sepenuhnya rasional karena perpecahan agama, kultur, dan etnis lebih sulit untuk diselesaikan daripada perpecahan ekonomi, baik yang terjadi di berbagai negara maupun kelas-kelas dalam sebuah masyarakat. Selain itu, lebih mudah bagi mereka untuk meredakan perpecahan ekonomi, dengan sebuah proses penyesuaian kenaikan gaji daripada meredakan perpecahan agama, kultur, atau etnis.

Pada abad ke-20, pertumbuhan industri, urbanisasi, dan kemakmuran di masyarakat Barat, di mana pun selalu diikuti dengan penurunan dalam perasaan beragama. Akan tetapi, hal ini memberikan keuntungan politik, seperti menurunnya konflik politik yang disebabkan oleh perpecahan agama di Eropa. Demikian pula, pertumbuhan integrasi politik di banyak negara Barat yang maju telah mendorong terjadinya penurunan bahasa kaum minoritas, dan semakin menghilangnya bahasa kesukuan, semakin menguntungkan perpolitikan.

Hal ini terjadi karena dalam agama, budaya, dan etnis memiliki identitas masing-masing. Identitas inilah yang kadang-kadang menjadi penghalang tumbuhnya identitas negara dan politik.

Saat ini tumbuhnya perpecahan suku di beberapa negara, yang mendorong munculnya gerakan nasionalis minoritas, merupakan konsekuensi dari perubahan sosial, ekonomi, atau politik yang telah menjadikan identitas etnis semakin memuncak daripada identitas lain yang lebih bersifat nasional. Hal ini menjadikan identitas etnis sebagai dasar terjadinya sebuah gerakan nasionalis baru yang menentang negara hanya karena mereka merasa mampu untuk membentuk identitas nasional yang baru, disertai dengan ditemukannya sumber-sumber perekonomian yang bisa menopang terbentuknya negara baru di daerah etnis tersebut.

Misalnya, di Skotlandia yang memilih *Scottish National Party* (Partai Nasional Skotlandia) sebanyak 840.000 suara pada tahun 1974, dari hanya 64.000 pada sepuluh tahun sebelumnya. Hanya karena ada lahan minyak yang besar di daerah mereka, identitas mereka sebagai orang Skotlandia semakin menonjol, dan hal ini tidak menjadikan sebagai orang liberalis atau konservatif atau orang Inggris.

Perpecahan etnis ini menguntungkan dalam beberapa hal, tetapi berkembang menjadi semakin keras dengan terjadinya perang saudara, seperti yang terjadi di Balkan, antara Serbia, Kroasia, dan Albania.

Pada tahun 1990 hanya Irlandia dan Bengali dari Bangladesh sebagai etnis minoritas yang mendapatkan pengakuan politik atas kemerdekaan mereka, dengan membentuk negara sendiri dari dalam sebuah negara yang sudah terbentuk. Alasan pertama dari perpecahan suku ini adalah planet ini berisi sekitar 6.000 hingga 15.000 kelompok etnis, yang mayoritas terbentuk karena migrasi dan perkawinan campuran yang sangat bergantung pada perekonomian, yang menjadikan mereka tidak mungkin untuk membentuk negara sendiri. Alasan kedua adalah dengan diberikannya kekuatan politik kepada kelompok etnis tersebut; dengan diberikannya kedudukan dan wewenang dalam pemerintahan.

2. Multikulturalisme

Berlawanan dengan konsep integrasi nasional dan proses membangun identitas nasional, konsep multikulturalisme menekankan peran penting identitas etnis dan subetnis sebagai faktor yang harus dihargai dan negara harus memfasilitasi keberlanjutannya, paling tidak hal ini diyakini oleh Pierre Trudeau (Perdana Menteri Kanada). Pendapat ini mendapatkan banyak serangan karena dianggap bertentangan dengan kebutuhan menciptakan persatuan, bahkan memperkuat perpecahan etnis. Paham multikulturalisme berkembang bersamaan dengan perkembangan hak-hak minoritas, seperti hak perempuan, orang cacat, dan kaum homoseksual yang berpendapat bahwa sebagai minoritas dalam masyarakat, mereka memiliki hak hidup seperti kaum minoritas lainnya.

Konsep ini pertama kali dimunculkan oleh Pierre Trudeau, Perdana Menteri Kanada pada tahun 1971, sebagai jawaban terhadap munculnya konsep bilingualisme dan bikulturalisme di Kanada, dengan memerhatikan dua kultur besar yang tumbuh di Kanada. Akan tetapi, ia memandang seluruh negaranya multikultural untuk mengisi kekosongan identitas dan kultur yang dimiliki oleh masyarakat Kanada.

Ia memulai dengan membentuk badan pemerintah yang bertanggung jawab masalah multikultural ini untuk memperoleh kesejahteraan politik dan ekonomi. Cara ini dilakukan untuk mengelompokkan identitas yang berbeda dan untuk membedakan antara Kanada dan Amerika. Akan tetapi, berlawanan dengan hal ini, Porter mengatakan bahwa konsep ini telah membuat jurang pemisah antaretnis yang jelas dan membentuk pembagian tenaga kerja secara kultural (Porter, 1975, 1979). Hal ini membuktikan bahwa bukanlah konsep multikulturalisme yang harus dijalankan, melainkan idealisme dan kebijakannya yang harus ditegakkan karena hal ini mengangkat kultur yang berbeda serta menjauhkan mereka dari perpecahan dan bisa dikendalikan oleh pemerintah.

Sebagai penjelasan yang singkat, pada umumnya masyarakat pada tingkatan tertentu adalah multi-etnis, tetapi tidak semuanya dapat digambarkan sebagai multikultural. Kebijakan pemerintah harus mengakui keberadaan mereka, dan di banyak negara kebijakan-kebijakan ini

BAB 6 MILITER DAN POLITIK

Dari perdebatan yang muncul berkaitan dengan hubungan sipil-militer tampak jelas bahwa permasalahan antara sipil dan militer sangat kompleks. Hubungan sipil-militer yang ideal adalah militer di bawah kendali atau di bawah otoritas sipil. Dengan kata lain, militer dikendalikan oleh sipil. Persoalan sipil-militer bisa muncul bermula dari persoalan sipil semata, persoalan militer, atau persoalan dari sipil dan militer. Persoalan serius yang sering dijumpai adalah ketika politisi sipil meminta bantuan militer untuk menopang kekuasaannya.

Beberapa analisis menyebutkan beberapa indikator tentang hubungan sipil-militer, misalnya hubungan sipil-militer akan baik apabila perhatian militer hanya berpusat pada permasalahan militer. Persoalannya muncul ketika militer menjalankan fungsi sipil atas permintaan politisi sipil dan tidak jelasnya garis batas antara militer dan sipil.

Indikator frekuensi konflik juga dapat mengukur baik-tidaknya hubungan sipil-militer. Hubungan sipil-militer dikatakan baik jika antara pemimpin sipil dan militer tidak banyak terjadi konflik. Akan tetapi, indikator ini memiliki kelemahan yang mendasar, yaitu dalam negara yang plural konflik sering mencerminkan kondisi yang tidak terhindarkan dan diharapkan dalam sistem politik yang plural.

Ukuran lainnya untuk menentukan hubungan baik sipil-militer adalah pejabat sipil-militer saling menyukai dan menghormati satu sama lainnya.

Ayat (2)

Sekretaris DPRD kabupaten/kota adalah jabatan karier pegawai negeri sipil sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan bidang kepegawaian. Dalam pengusulan pengangkatannya, bupati/walikota mengajukan 3 (tiga) orang calon kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapat persetujuan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 421

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kelompok pakar atau tim ahli" adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.

Kelompok pakar atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota. Penugasan kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 422

Cukup jelas.

Pasal 423

Cukup jelas.

Pasal 424

Cukup jelas.

Pasal 425

Cukup jelas.

Pasal 426

Cukup jelas.

Pasal 427

Cukup jelas.

Pasal 428

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5568

DAFTAR PUSTAKA

Afan Gaffar. 1992. *Javanese Voters: a Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: GMU Press.

_____. 1998. "Merangsang Partisipasi Politik Rakyat" dalam Indria Samego (Pengantar). *Demitologisasi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme dalam Orde Baru*. Jakarta: CIDES.

Agus Wirahadikusuma. 1999. *TNI Menghadapi Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Sinar Harapan.

Alfred Stepan. 1978. *The State and Society: Peru in Comparative Perspective*. NY: Princeton University Press, Princeton.

Amos Perlmutter. 2000. *Militer dan Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

Anders Uhlin. 1998. *Oposisi Berserak: Arus Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan.

Anders Wetholm dan Richard G. Niemi. 1992. "Political Institution and Political Socialization: a Cross-National Study" dalam *Jurnal Comparative Politics Studies*, Vol. 24. No. 1 - Oktober.

Andrew Heywood. 2000. *Key Concept in Politics*. New York: Palgrave.

Anonimous. 1999. *Dokumen; Paradigma Baru Peran TNI*. Jakarta: Mabes ABRI.

Anthony Giddens. *The Central Problem in Social Theory*. 1985. London: Macmillan.

- Anthony H. Birch. 2001. *The Concepts and Theories of Modern Democracy*. 2nd Edition Rothledge London and New York.
- Arie Sujito dan Sutoro Eko (editor). 2002. *Demiliterisasi, Demokratisasi*. Yogyakarta: IRE Press.
- Arief Budiman. (Ed.). 1990. *State and Civil Society in Indonesia*. Sydney: Allen and Unwin.
- _____. 1991. *Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas.
- _____. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia.
- Antantya H. Mulyanto. 1999. "Mengkaji Kembali Dikotomi Peran Politik ABRI", dalam Abdulrahman Wahid dkk. *Berpolitik atau Kembali ke Barak*. Yogyakarta: Bigraf.
- Atilio Boron. 1981. "Latin America: Between Hobbes and Friedman". *New Left Review*, 130, November/December.
- B. Guy Peters. 2001. *The Politics of Bureaucracy*. London and New York: Routledge.
- Benjamin Barber. 1984. *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. Berkeley: University of California Press.
- Bryan Turner. 1978. *Marx and the End of Orientalism*. London: George Allen and Unwin.
- Burhan D. Magenda. 2000. "Kata Pengantar Edisi Bahasa Indonesia", dalam Amos Perlmutter. *Militer dan Politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- _____. 2001. "Kata Pengantar", dalam Arif Yulianto. *Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca ORBA: di Tengah Pusaran Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- C. Wright Mills. 1956. *The Power Elite*. London: Oxford University Press.
- C.P.T. George Yeo. 1981. *The Military and the Nation State*. Journal. Singapore: Pointer Journal.
- Chantal Moufie. 1996. "Citizenship". dalam Seymour Martin Lipset (Ed.). *The Encyclopedia of Democracy*. Vol. III. Washington D.C: Congreassional Quarterly Inc,

- Christina Holtz-Bacha. 2008. "Political Disaffection", dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha. *Encyclopedia of Political Communication*. California: Sage Publications.
- Claude E. Welch. 1971. *Military Role and Perspective on Civil-Military Relation*. Massachusett: Duxbury Press.
- _____. 1998. "Studi Perbandingan Modernisasi Politik", dalam Yahya Muhaimind dan Colin MacAndrews (Eds.). 1998. *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Colin Leys. 1996. *The Rise and Fall of Development Theory*. London: James Currey, Indiana University Press.
- D. Jackson dan Lucian W. Pye (Ed.). 1978. *Political Power and Communications in Indonesia*. California and London: University of California Press.
- David C. Korten. 1988. "Kerangka Kerja Perencanaan untuk Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat", dalam David C. Korten dan Sjahrir, (Eds.). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- David Denver. 1989. *Election and Voting Behavior in Britain*. London: Philip Allan Publish.
- David F. Roth dan Frank Wilson. 1976. *The Comparison Study of Politics*. Boston: Houghton Company.
- Dean Jaros dan Lawrence V. Grant. 1974. *Political Behavior: Choice and Perspective*. London: St. Martin's Press.
- Deden Faturohman dan Wawan Sobari. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Didik Rachbini. (Ed). *Negara dan Kemiskinan di Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Douglas Chalmers. 1985. "Corporatism and Comparative Politics", dalam Howard Wiarda (Ed.). *New Directions in Comparative Politics*. Colorado: Westview Press, Boulder.
- Dwayne Marvick dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eep Saefullah Fatah. 2000. *Zaman Kesempatan Agenda-agenda Besar, Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Bandung : Mizan.